

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abra, Emy Hajar, 2025, *Ilmu Perundang-Undangan*. Gita Lentara, Padang.
- Budi Setiyono, 2018, *Model & Desain Negara Kesejahteraan, Nuansa Cendekia*, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Jaidun, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Samarinda, Prenada Media Grup.
- Lilin Budiati, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki Peter Muhammad, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana., Prenada Media,
- Rahayu Ani Sri, 2022, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. 2024. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2015. *Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat. Surabaya: Airlangga University Press.
- Razy Fakhruddin, 2020, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, Jawa Tengah, Pena Persada.
- Ridwan HR. 2023. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Sands, Philippe and Jacqueline Peel. 2018. *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Suhariyanto Didik, dkk, 2024, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Sumatera Barat, Gita Lentera,
- Sulaksono, 2023, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, CV Jakat Media Publishing.

Widyastuti Tiyas, Vika Permatasari, Putri Yuli, Mukhidin, 2024, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Udara*, Jawa Tengah, Nasya Expanding Management.

Yayan Rianto, 2021, *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*, Malang, Media Nusa Creative.

## 2. JURNAL

Anugrah, Fajrian Noor. "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Prespektif Otonomi Daerah." *Wasaka Hukum* 9.2 (2021): 202-222.

Anton Rosari, Darnis, dan Leri Patra. "Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4.3 (2024): 308-320.

Arifin, Firdaus, and Harri Tri Ramdhani. "Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2.1 (2024): 115-148,

Asiyah, Nur. "Kebijakan pemerintah kota langsa terhadap pengelolaan sampah dalam memenuhi prinsip *good environmental governance*." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.2 (2019): 316-327.

Halimah, Ulfa Nur, and Erlin Kurniati. "Sinergi peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan." *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis* 2.2 (2025): 1-19.

Jannah, Annisa Sephia, et al. "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 4.1 (2025): 99-115,

Najicha, Fatma Ulfatun. "Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan." *Doktrina: Journal of Law* 5.1 (2022): 1-7,

Nasir, Melisa, et al. "Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 241-254.

Nasir, Mohamad. *Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun*

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

- Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.11, 2023.
- Nur, Muh Syainal, and Achmad Husen. "Studi Literatur: Penerapan *Good environmental governance* dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 11.1 (2022): 35-49.
- Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 277-290.
- Pantow, Fierany, Gustaaf Buddy Tampi, and Rully Mambo. "Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 5 (2019),
- Prastiti, Hilda Swandani. "Menakar efektivitas pendekatan penataan (Compliance Approach) dan pendekatan penjeratan (Deterrence Approach) dalam penegakan hukum lingkungan." *Tanjungpura Law Journal* 6.1 (2022): 1-13,
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *Likhitaprajna* 23.2 (2021): 139-151.
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. "Penguraian konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum: Dari dimensi individu ke masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.8 (2024): 570-574,
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2.2 (2023): 201-222.
- Rahmadani, Rahmadani, and Zulyan Zulyan. "Edukasi Meningkatkan Pemahaman Anak Tentang Peran Pemerintah Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Warga Negara." *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2.3 (2025): 1437-1445.

- Ruhyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7.1 (2022): 39-58.
- Siagian, Fahrizal S., Geofani Milthree Saragih, and Frans Maruli Silaban. "Implementation of Straight Liability and Liability Based on Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia." *Justices: Journal of Law* 3.3 (2024): 197-203.
- Siregar, Solhani Guntur. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan." *The Juris* 8.1 (2024): 313-331.
- Sriyanti, Sriyanti. "Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1.2 (2023): 24-39,
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 96-102.
- Sukma, Gina Laelita. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10.2 (2024): 445-461.
- Widiastuti, Tri, et al. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Journal of Law and Nation* 3.2 (2024): 264-280.

### **3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)

#### 4. INTERNET

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2023. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2023*. Jember: BPS Kabupaten Jember.

Beritajatim. 2025. "Dinas Perikanan Jember: Tambak di Pesisir Selatan Tidak Berkontribusi untuk PAD." Diakses melalui <https://beritajatim.com/dinas-perikanan-jember-tambak-di-pesisir-selatan-tidak-berkontribusi-untuk-pad>, pada tanggal 26 Juni 2026.

Mongabay Indonesia. 2025. "Cemari Pesisir, Aktivis Desak Setop Tambak Udang di Jember." Diakses melalui <https://mongabay.co.id/2025/03/23/cemari-pesisir-aktivis-desak-setop-tambak-udang-di-jember/>, pada tanggal 12 Maret 2026

Mongabay Indonesia. 2025. "Kala Tambak Udang Cemari Lahan Tani dan Laut Jember." Diakses melalui <https://mongabay.co.id/2025/03/07/kala-tambak-udang-cemari-lahan-tani-dan-laut-jember/>, pada tanggal 12 Maret 2026.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Komisi B dan C DPRD Jember Gelar Sidak Tambak Udang di Kecamatan Gumukmas, Ditemukan Banyak Persoalan yang Merugikan Petani, Dokumen Publikasi Resmi, diakses dari <https://dprd.jemberkab.go.id>, pada tanggal 29 Mei 2026.

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Tambak Udang Modern Berdiri 40 Tahun Lebih, DPRD Jember Minta Pengoperasiannya Dihentikan Sementara, Dokumen Publikasi Resmi Rekomendasi Dewan, diakses dari <https://dprd.jemberkab.go.id>, pada tanggal 29 Mei 2026.